# BAB II

**KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis menjelaskan mengenai konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Lalu, yang kedua adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, uraian singkat, dan di dalam kerangka pemikiran terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

1. **Landasan Teoritis** 
   1. **Teori  *Signaling***

Teori sinyal (*signaling theory*) merupakan salah satu teori yang menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja perusahaan. Isyarat atau sinyal menurut Brigham & Houston, (2015:470), adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal tersebut dapat didefinisikan sebagai petunjuk bagi investor mengenai pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan kedepan yang diwujudkan dalam suatu tindakan manajemen perusahaan. Manajer mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetris informasi antara perusahaan dan pihak luar. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Sinyal tersebut dapat berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik atau berupa informasi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

Dengan adanya *signalling theory* ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak manajemen perusahaan terkhususnya perusahaan yang telah *go public* pasti memberikan informasi kepada para investor sehingga investor dapat mengetahui keadaan perusahaan dan prospeknya di masa depan. Oleh sebab itu dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi investor dapat membedakan perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik, sehingga di masa mendatang dapat memberikan keuntungan bagi investor tersebut. Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dianggap sebagai sinyal bagi investor dalam menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan profitabilitas dapat membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Jika perusahaan mempunyai profitabilitas yang tinggi menandakan kemampuan menghasilkan laba perusahaan tersebut baik dan itu akan menambah nilai perusahaan dimata investor. Sinyal positif ini diharapkan berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. Karena pada dasarnya nilai perusahaan dapat dikatakan baik salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu.

* 1. **Teori Agensi**

Menurut Scott, (2015:358), teori agensi adalah “*a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise conflict with those of the principal”.*

Teori keagenan merupakan hubungan kontraktual diantara dua pihak, yaitu *principal* dan *agent.* Jensen & Meckling (1976:308), menyatakan hubungan keagenan sebagai “*a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decisions making authority to the agent”.* Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. *Agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya.

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang diukur dengan harga saham. Menurut Sukirni (2012), peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham dalam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan memaksimumkan modal kerja yang dimiliki. Apabila tindakan antara manajer dengan pihak lain tersebut berjalan sesuai, masalah diantara kedua pihak tersebut tidak akan terjadi. Kenyataannya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict,* hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer. Menurut Jensen & Meckling (1976), mekanisme untuk mengatasi konflik keagenan antara lain dengan cara meningkatkan kepemilikan insider (insider ownership) sehingga dapat mensejajarkan kepentingan pemilik dan manajer. Atau dengan cara kontrol dari pihak luar dimana peran *monitoring* dan pengawasan yang baik akan mengarahkan tujuan sebagaimana mestinya. Karena apabila konflik keagenan tidak ditangani, akan timbul *agency cost*, dimana *agency cost,* merupakan biaya yang timbul bagi pemegang saham sebagai bentuk dari kinerja manajemen perusahaan. Adanya konflik agensi juga akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memaksimumkan kekayaan pemegang saham.

* 1. **Nilai Perusahaan**

Menurut Prasetyo dalam Adeyani Tandean & Jonathan, (2016) nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang menjadi cerminan atas tingkat kepercayaan masyarakat atas perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai perusahaan semakin sejahtera pemiliknya, dan sebaliknya semakin rendah nilai perusahaan maka anggapan publik tentang kinerja perusahaan tersebut adalah buruk dan investor pun akan tidak berminat pada perusahaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran di pasar modal yang merefleksikan penilaian investor terhadap kinerja perusahaan, sehingga dari pengertian tersebut nilai perusahaan diukur dengan menggunakan harga saham. Karena semakin tinggi harga saham dipasar akan mencerminkan nilai perusahaan itu baik bagi investor sehingga diharapkan mampu memberikan tingkat kembalian yang tinggi pula untuk pemegang saham. Meningkatkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan, sehingga apabila nilai perusahaan meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan.

Nilai perusahaan merupakan hal penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi investor menilai perusahaan secara keseluruhan. Christiawan & Tarigan (2007), menjelaskan beberapa nilai suatu perusahaan sebagai berikut:

1. Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
2. Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
3. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai rill suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan dikemudian hari.
4. Nilai buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
5. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan sakan likuidasi.

Nilai perusahaan yang tinggi akan dapat membawa kesejahteraan bagi para pemegang sahamnya, oleh karena itu bila semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham. Metode dan teknik dalam penilaian perusahaan menurut Sudiyatno & Puspitasari (2010) dalam penelitiannya adalah:

1. Tobin’s Q

Menurutnya, Tobin’s Q dapat digunakan dalam mengukur kinerja dan nilai perusahaan. Tobin’s Q merupakan teknik menilai nilai perusahaan yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang (*enterprise value*) terhadap *replacement cost* dari aktiva perusahaan. Apabila perusahaan memiliki nilai lebih besar dari nilai dasar sebelumnya, potensi mendapat laba akan meningkat.

1. Altman Z-score

Berbeda dari Tobin’s Q yang melihat nilai perusahaan dari sisi pertumbuhan nilai saham perusahaan, Altman Z-score adalah model prediksi kebangkrutan. Model ini dikembangkan oleh Edward I Altman pada tahun 1968. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan atau tidak.

Dalam penelitian ini metode dan teknik yang digunakan untuk menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin’s Q. Tobin’s Q memiliki kelebihan dibanding rasio nilai perusahaan lainnya karena rasio ini dapat menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental dibandingkan perhitungan nilai perusahaan yang lainnya. Jika rasio-q diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan meransang investasi baru. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin pada tahun 1967. Rasio Tobin's Q dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kegiatan perusahaan, seperti performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Nilai Tobin's Q dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar saham dan nilai pasar hutang yang kemudian dibandingkan dengan nilai seluruh asset perusahaan. Rasio Tobin's Q adalah salah satu indikator untuk mengukur nilai perusahaan dari perspektif investasi yang telah di uji. Oleh karena itu Tobin's Q dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan dari sisi nilai pasar suatu perusahaan. Tobin's Q menjelaskan sejumlah fenomena perusahaan yang beragam, sehingga dengan Tobin's Q dapat dilihat terdapat perbedaan *cross-sectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi.

Tobin's Q adalah gambaran statistik yang berfungsi sebagai proksi dari nilai perusahaan dari perspektif investor, karena menurut definisi dijelaskan bahwa Tobin's Q merupakan nilai pasar dari aset perusahaan dan *replacement value of those assets.* Sehingga secara matematis Tobin’s Q dapat dihitung dengan menggunakan rumusan:

Keterangan:

Q : Nilai Perusahaan

MVE : Nilai Pasar Ekuitas (*Market Value of Equity*), merupakan perkalian antara nilai pasar saham diakhir periode dengan jumlah saham yang beredar diakhir periode.

BVE : Nilai Buku Ekuitas (*Book Value of Equity*), merupakan selisih antara total aset perusahaan dengan kewajiban.

D : Total Hutang

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena dapat menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian setiap dana yang diinvestasikan, dimana semakin besar nilai Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Perusahaan dengan Q yang tinggi, atau Q > 1,00 memiliki peluang investasi yang baik, sehingga dapat diasumsikan manajemen perusahaan dapat mengelola perusahaanya dengan baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi sehingga akan menarik munculnya potensi investasi yang baru, sedangkan apabila rasio Q di bawah 1,00 menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva tidak menarik investor untuk memberikan investasinya yang baru. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar potensi investor melakukan pendanaan untuk investasi.

* 1. **Pajak**

#### Pengertian Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak Waluyo (2017:2-3), di antaranya:

1. Menurut P. J. A. Adriani:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

1. Menurut Edwin R. A. Seligman:

“*Tax is compulsary contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”*

1. Menurut Soeparman Soemahamidjaja:

“Pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarakan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

1. Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetfair,* yaitu mengatur.

#### Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara, ada dua fungsi utama pajak menurut Waluyo (2017:6), yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di sosial dan ekonomi bidang. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

#### Hukum Pajak

Pajak merupakan suatu iuran wajib dan bersifat memaksa, sebab dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah mendasari aturan-aturan perpajakan dalam hukum pajak yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Adapun menurut Resmi (2016:4-5), hukum pajak dapat dikategorikan menjadi:

1. Hukum pajak materil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Contohnya, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

1. Hukum pajak formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelanggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, tetapi yang bersifat melawannya. Namun, lama-kelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

#### Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak harus memegang teguh asas-asas pemungutan pajak, karena sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2017:13-14)

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

1. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas watu pembayaran.

1. *Convenience*

Kapan Wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn.*

1. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

#### Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sistem yang diberlakukan dalam suatu negara dalam tata cara pemungutan pajak. Di Indonesia sistem pemungutan pajak Yang diberlakukan secara umum adalah *self assessment system*. Adapun menurut Waluyo (2017:17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
4. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

1. Sistem *Witholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### Perlawanan Terhadap Pajak

Dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, dikarenakan sifat pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat di Indonesia yang enggan membayar pajak. Hal ini terlepas dari kesadaran sebagai warga negara dan karena hal ini menimbulkan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak menurut Waluyo (2017:13) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

1. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:11) bentuk-bentuk perlawanan aktif, meliputi:

1. *Tax Avoidance,* usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax Evasion,* usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak).

#### Manajemen Pajak

Dilihat dari uraian diatas tentang pengertian pajak, maka pajak merupakan bagian dari penerimaan negara, tetapi di lain sisi pajak juga merupakan sebuah beban biaya bila dilihat melalui sudut pandang wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan, Karena perusahaan pada umumnya melakukan kegiatan usahanya demi mencari laba, sehingga dalam hal meningkatkan pendapatannya tentu perusahaan akan mengurangi beban biaya serendah mungkin, sehingga beban biaya dari pajak harus dibuat minimal agar keuntungan perusahaan maksimal.

Manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan *tax* manajer dalam perusahaan sehingga dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan. Selain itu dijelaskan juga bahwa diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya karena sifat manusia, yang ingin membayar sekecil-kecilnya. Oleh karena itu Pohan (2013:13), memaparkan fungsi dari manajemen pajak kedalam 3 fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pajak *(tax planning)*

*Tax planning* secara garis besar diterapkan untuk mengatur perencanaan perpajakan dalam usaha agar lebih efektif dan efisien.

1. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

*Tax implementation* berfungsi untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban perpajakan yang timbul akibat aktivitas perusahaan.

1. Pengendalian pajak (*tax control*)

*Tax control* adalah mengendalikan beban perpajakan yang terjadi dari aktivitas perusahaan.

* 1. ***Tax Avoidance***

Menurut Pohan (2013:23-24), *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dua cara yang dapat dilakukan oleh perencana pajak perusahaan, adalah *tax saving* dan *tax avoidance* karena perbuatan seperti itu tidak melanggar undang-undang. *Tax saving* adalah usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan, sedangkan *tax avoidance* adalah usaha yang sama dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa. Pada hakekatnya, *Tax avoidance* merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya. Namun, dalam melakukan tindakan *tax avoidance* ini harus diupayakan agar tidak terperangkap dalam perbuatan *tax evasion.*

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR). Pada dasarnya ETR merupakan sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Waluyo (2017:18) ,tarif pajak efektif adalah presentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Untuk mengukur *tax avoidance* terdapat beberapa cara, yaitu:

Tabel 2.1

Pengukuran Tax Avoidance

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cara Pengukuran** | **Cara Perhitungan** | **Keterangan** |
| GAAP ETR |  | *Total tax expense per dollar of pre-tax income* |
| *CURRENT* ETR |  | *Current tax expense per dollar of pre-tax book income* |
| *CASH* ETR |  | *Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income* |
| *LONG-RUN CASH* ETR |  | *Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years* |

*Sumber:*Hanlon and Heitzman (2010)

Dalam penelitian ini, mengukur *tax avoidance* menggunakan pengukuran *Current ETR.* Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Current ETR* dengan maksud untuk dapat mewakili pajak kini dan pajak tangguhan, perhitungannya dengan cara membandingkan beban pajak penghasilan kini dengan pendapatan sebelum pajak, dari hasil tersebut kita dapat melihat seberapa besar perusahaan melakukan *tax avoidance.*

### Profitabilitas

#### Pengertian Rasio Profitabilitas

Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan utama yaitu memperoleh *profit* yang sebesar-besarnya. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya Hery (2014:192).

#### Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Hery (2014:192-193), tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan, yaitu:

* + - 1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
      2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
      3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
      4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
      5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dana yang tertanam dalam total ekuitas.
      6. Untuk mengukur marjin laba kotor atas penjualan bersih.
      7. Untuk mengukur marjin laba operasional atas penjualan bersih.
      8. Untuk mengukur marjin laba bersih atas penjualan bersih.

#### Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas ada beberapa jenis, dan penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menurut Hery (2014:193-199):

* + - 1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return On Assets*)

Rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah ROA berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROA:

* + - 1. Hasil Pengembalian atas Equity (*Return On Equity*)

Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

Semakin tinggi ROE berarti semakin tinggi pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah ROE berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROE:

* + - 1. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas penjualan bersih.

Semakin tinggi *gross profit margin* berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin* berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin*:

* + - 1. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional atas penjualan bersih.

Semakin tinggi *operating profit margin* berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *operating profit margin* berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *operating profit margin:*

* + - 1. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.

Semakin tinggi *net profit margin* berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *net profit margin* berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *net profit margin*:

Di dalam penelitian ini, profitabilitas dari perusahaan diproksikan dengan *Return On Assets*. Penggunaan ROA dalam penelitian ini karena ROA memiliki keunggulan, ROA merupakan indikator pengukuran yang komprehensif untuk melihat keadaan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada karena meliputi unsur yang ada di *Balance Sheet* dan *Income Statment*.

* 1. **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer pada perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial adalah salah satu kesempatan untuk para manajer dapat terlibat langsung dalam kepemilikan saham, sehingga dengan adanya keterlibatan manajer secara langsung akan membuat kedudukan yang sejajar dengan para pemegang saham yang lain. Sehingga manajer dapat terlibat langsung dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja para manajer, sehingga dapat membuat nilai perusahaan menjadi lebih baik dan bijaksana. Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Menurut Dewi and Sanica (2017), kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif me-*monitoring* aktivitas perusahaan. Menurut Jensen and Meckling (1976), peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong manajer untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak secara hati-hati, karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham.

* 1. **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah sebuah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan dari sebuah intitusi atau lembaga lain. Kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme dalam me-*monitoring* yang sangat efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Karena kepemilikan institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan nilai perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan istitusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya tehadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Kepemilikan institusional di suatu perusahaan seharusnya memainkan peran penting dalam memantau dan mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Sehingga semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan menyebabkan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk dapat memaksimalkan laba perusahaan.

1. **Penelitian Terdahulu**

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Penelitian (Tahun)** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian (Kesimpulan)** |
| Amalia Ilmani & Catur Ragil Sutrisno (2014) | Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating | Dependen:  Nilai Perusahaan  Independen:  *Tax Avoidance*  Moderator:  Transparansi Persahaan | *Tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Variabael transparansi dapat memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan. |
| Ria Nofrita (2013) | Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI) | Dependen:  Nilai Perusahaan  Independen:  Profitabilitas  Mediasi:  Kebijakan Deviden | Profitabilitas dan kebijakan deviden berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan deviden tidak signifikan. |
| Aprilia Anita & Arief Yulianto (2016) | Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan | Dependen:  Nilai Perusahaan  Independen:   * Kepemilikan Manajerial * Kebijakan Dividen | Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. . |
| Maya Indah Pratiwi, Farida Titik Kristanti, SE., M.si, & Dewa Putra Khrisna Mahardika, SE., M.si (2016) | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan | Dependen:  Nilai Perusahaan  Independen:   * Kepemilikan Manajerial * Kepemilikan Institusional * Leverage | Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. |

1. **Kerangka Pemikiran** 
   1. **Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan**

Penghindaran pajak merupakan aktivitas meminimalkan kewajiban pajak tetapi dengan cara yang legal yaitu dengan memanfaatkan celah-celah pada peraturan dan kebijakan mengenai perpajakan. *Tax avoidance* dapat berpotensi memicu konflik agensi antara kepentingan manajer dengan kepentingan investor. Perusahaan memiliki alasan dalam melakukan praktik *tax avoidance* yaitu untuk mengurangi hutang pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut tentunya merupakan pencerminan dari perilaku oportunistik manajer yang seharusnya memberikan informasi yang akurat kepada para investor. Perilaku *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara memanipulasi pajak yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar, kegiatan tersebut tentunya memberikan efek kepada para pemegang saham dimana mengakibatkan menurunnya kandungan informasi dari laporan keuangan perusahaan, dengan semakin berkurangnya kandungan informasi yang disajikan maka akan berdampak pada semakin rendahnya nilai perusahaan. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Ilmiani and Sutrisno (2014), menunjukkan *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

1. **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan**

Profitabilitas merupakan fokus utama penilaian kinerja finansial perusahaan dan memberi gambaran kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingginya tingkat profitabilitas akan diikuti dengan meningkatnya nilai suatu perusahaaan. Profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memperoleh laba yang tinggi dan dianggap sebagai sinyal positif bagi investor karena perusahaan memungkinkan memiliki prospek bagus di masa mendatang. Semakin baik pertumbuhan profitabilitas berarti prospek perusahaan di masa depan dinilai semakin baik juga, artinya semakin baik pula nilai perusahaan dimata investor. Apabila kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka harga saham juga akan meningkat. Harga saham yang meningkat mencerminkan nilai perusahaan yang baik bagi investor. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Nofrita (2013) dan Setiawati and Lim (2015), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

### Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh manajer pada perusahaan tersebut. Semakin bertambahnya saham yang dimiliki manajer melalui kepemilikan manajerial akan memotivasi kinerja manajemen karena mereka merasa memiliki andil dalam perusahaan baik sebagai pengambil keputusan maupun dalam tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Sehingga pada akhirnya kinerja manajemen akan semakin baik dan berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Sholekah & Venusita (2014) dan Anita & Yulianto (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

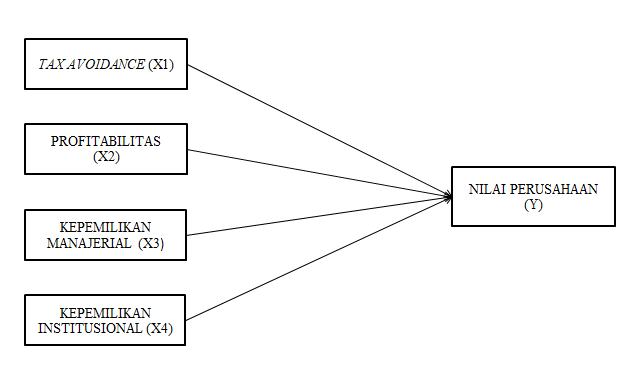
### Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme dalam me-*monitoring* yang sangat efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Besarnya proporsi kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka semakin besar peran institusional dalam memonitor manajer. Pengawasan ini diharapkan dapat mendorong manajer untuk meningkatkan kinerja manajer. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga nilai perusahaan semakin meningkat. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Fauzan, Nadirsyah., & Arfan (2012) dan Pratiwi, Kristanti, & Mahardika (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Dengan demikian dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Pengaruh Tax Avoidance, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

****

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Tax Avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.